

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH DAN SEJARAH PERTI DI INDONESIA

A. Gambaran Umum Bengkulu

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak di antara 2°16'–5°31' Lintang Selatan dan 101°01'–103°41' Bujur Timur. Secara geografis, wilayah Provinsi Bengkulu berada di pesisir barat Pulau Sumatra dan langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, sehingga memiliki karakter wilayah pantai yang cukup panjang serta kondisi geografis yang beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga kawasan pegunungan Bukit Barisan.¹

Provinsi Bengkulu secara administratif dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatra Selatan. Sejak penetapannya sebagai provinsi, Bengkulu berkembang menjadi wilayah administratif tersendiri dengan struktur pemerintahan provinsi yang lengkap.²

Berdasarkan perkembangan administrasi wilayah, Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah sekitar 19.919 km², yang terdiri atas wilayah daratan dan perairan pesisir. Secara administratif, Provinsi Bengkulu terbagi ke dalam 9 kabupaten dan 1 kota, yaitu

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Provinsi Bengkulu dalam Angka 2023*, Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu, 2023, hlm. 3–4.

² <https://meridianhukum.com/peraturan/uu-no-9-tahun-1967> diakses 25 Januari 2026 jam 16:37

Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko, Rejang Lebong, Seluma, serta Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi.

Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung
- Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia

Letak geografis tersebut memberikan pengaruh terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Bengkulu, terutama dalam pembentukan pola permukiman, mata pencaharian, serta interaksi masyarakat pesisir dan pedalaman.

2. Iklim dan Kondisi Alam

Musim yang terjadi di Wilayah Provinsi Bengkulu, sebagaimana wilayah lain di Indonesia dikenal mengalami dua musim, yaitu musim hujan yang terjadi di bulan Desember-Maret dan musim kemarau yang terjadi di bulan Juni-September. Sementara pada bulan April-Mei dan Oktober-November merupakan masa peralihan atau pancaroba. Pengamatan unsur iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Bengkulu antara lain suhu,

kelembaban udara, kecepatan angin, dan tekanan udara. Rata-rata suhu udara (temperatur) di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 yaitu pada suhu $28,7^{\circ}\text{C}$, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata suhu pada tahun sebelumnya yaitu sebesar $29,0^{\circ}\text{C}$. Suhu minimum pada tahun 2021 sebesar $22,0^{\circ}\text{C}$ dengan suhu udara terendah terjadi pada bulan Oktober dan suhu maksimum sebesar $34,8^{\circ}\text{C}$ dengan suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Mei. Rata-rata kelembaban udara sepanjang tahun 2021 adalah 76,8 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 77,0 persen.

Kelembaban udara minimum pada tahun 2021 sebesar 48,0 persen dengan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Mei dan Juli dan kelembaban udara maksimum sebesar 100 persen dengan kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Juni, Oktober, dan November. Rata-rata kecepatan angin pada tahun 2021 adalah sekitar 5,0 meter/ detik, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kecepatan angin pada tahun sebelumnya sebesar 2,6 meter/ detik. Kecepatan angin maksimum pada tahun 2021 sebesar 22,0 meter/ detik. Rata-rata tekanan udara yang tercatat sepanjang tahun 2021 adalah sebesar 1.008,1 mb, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rata-rata tekanan udara sebesar 1.008,0 mb. Rata-rata tekanan udara minimum pada tahun 2021 sebesar 1.003,0 mb dengan tekanan udara terendah terjadi pada bulan Januari dan tekanan udara maksimum sebesar

1.014,8 mb dengan tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Oktober.

Jumlah curah hujan di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2021 memiliki rata-rata sebesar 3.658,1 mm, lebih rendah jika dibandingkan terhadap tahun sebelumnya dengan rata-rata curah hujan 4.272,5 mm. Jumlah curah hujan tertinggi tahun 2021 terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 447,4 mm dan yang terendah terjadi pada bulan April yaitu sebesar 158,9 mm. Jumlah hari hujan setiap bulan pada tahun 2021 di Provinsi Bengkulu sebesar 23,2 hari, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 23,6 hari.³

Provinsi Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah barat. Secara geografis, wilayah Provinsi Bengkulu membentang dari daerah pesisir hingga kawasan pegunungan Bukit Barisan di bagian timur. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai sekitar 19.919,33 km², dengan topografi yang bervariasi, meliputi dataran rendah pantai, perbukitan, serta pegunungan. Ketinggian wilayah berkisar antara 0 hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, terutama di wilayah timur yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan.⁴

³ <https://www.geografi.org/2022/04/geografi-provinsi-bengkulu.html> diakses tanggal 30 juni 2025, pukul 23.33.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2022*, Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu, 2022, hlm. 3-6.

Jenis tanah di Provinsi Bengkulu didominasi oleh tanah aluvial di wilayah pesisir dan dataran rendah, serta tanah latosol dan andosol di daerah perbukitan dan pegunungan. Kondisi tanah tersebut relatif subur dan mendukung aktivitas pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Provinsi Bengkulu juga dialiri oleh sejumlah sungai besar, seperti Sungai Musi Hulu, Sungai Ketahun, dan Sungai Seblat, yang berperan sebagai sumber air bagi pertanian dan kebutuhan masyarakat, meskipun pada musim hujan juga berpotensi menimbulkan banjir di daerah tertentu. Selain itu, garis pantai Provinsi Bengkulu yang cukup panjang menjadi potensi penting dalam sektor perikanan, pariwisata, dan perekonomian daerah.⁵

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada Juni 2024 tercatat mencapai sekitar 2,1 juta jiwa. Persebaran penduduk di provinsi ini tidak merata, dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah perkotaan dan beberapa kabupaten tertentu.

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Statistik Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu 2022*, Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu, 2022, hlm. 9-13.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Persentase (%)
1	Kota Bengkulu	390,06	18,59
2	Bengkulu Utara	304,72	14,52
3	Rejang Lebong	285,75	13,62
4	Seluma	214,50	10,22
5	Mukomuko	201,23	9,59
6	Bengkulu Selatan	174,94	8,34
7	Kepahiang	154,62	7,37
8	Kaur	134,05	6,39
9	Bengkulu Tengah	124,09	5,91
10	Lebong	114,15	5,44
	Total	+ 2.097,11	100,00

Sumber: Databoks.katadata.co.id

4. Agama

Penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 didominasi oleh pemeluk agama Islam. Berdasarkan data kependudukan per 31 Desember 2024, jumlah penduduk beragama Islam di Provinsi Bengkulu tercatat sebanyak 2.066.774 jiwa atau sekitar 97,85 persen dari total penduduk. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk Muslim di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan sebesar 35.739 jiwa. Dominasi penduduk beragama Islam ini menunjukkan kuatnya karakter sosial-

keagamaan Islam dalam kehidupan masyarakat Bengkulu dan menjadi landasan penting bagi perkembangan organisasi-organisasi Islam di daerah tersebut.

Tabel 2,2

No	Agama	Jumlah penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	2.066.774	97,85
2	Peotestat	33.718	1,60
3	Katolik	8.160	0,39
4	Hindu	4.236	0,20
5	Buddha	2.050	0,10
6	Konghucu	8	0,00
	Total	+2.114.946	100,00

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), data penduduk menurut agama Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2024

5. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, pada tahun ajaran 2023/2024 Provinsi Bengkulu memiliki satuan pendidikan formal yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Lembaga pendidikan tersebut mencakup berbagai jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah atas, dengan jumlah 1.208 unit Taman Kanak-Kanak (TK), 1.421 unit Sekolah Dasar (SD), 469 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), 157 unit Sekolah

Menengah Atas (SMA), 103 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta 18 unit Sekolah Luar Biasa (SLB).⁶

Keberadaan satuan pendidikan tersebut didukung oleh jumlah peserta didik yang pada tahun yang sama tercatat mencapai 431.446 siswa, dengan dukungan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 38.798 orang.⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu telah memiliki jaringan pendidikan formal yang relatif lengkap dan memadai dalam menunjang proses pendidikan masyarakat dari tingkat dasar hingga menengah.

Selain pendidikan dasar dan menengah, Provinsi Bengkulu juga memiliki lembaga pendidikan tinggi yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia. Hingga tahun 2024, tercatat terdapat 3 perguruan tinggi negeri dan 14 perguruan tinggi swasta yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.⁸

⁶ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, *Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2023/2024* (Bengkulu: Disdikbud Provinsi Bengkulu, 2024), hlm. 45–47.

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Provinsi Bengkulu dalam Angka 2024* (Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu, 2024), hlm. 178–180.

⁸ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Statistik Pendidikan Tinggi Provinsi Bengkulu Tahun 2024* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2024), hlm. 112.

Tabel 2.3

Tabel data Pendidikan di Provinsi Bengkulu

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah
1	TK	1.208
2	SD	1.421
3	SMP	469
4	SMA/SMK	260
5	SLB	18
6	Perguruan Tinggi	17
	Jumlah	3.393

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu,

Data Terpadu Pendidikan Provinsi, 2023/2024

1. Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah atau belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal. Termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
2. Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal dan nonformal (Paket A, B, atau C), baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan

tinggi. Bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.

3. Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A, B, atau C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif mengikuti pendidikan.
4. Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.
5. Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dengan suatu aksara tertentu.

B. Sejarah perti di Indonesia

Minangkabau merupakan wilayah yang terkenal kuat keterkaitannya pada adat, disamping itu, Minangkabau adalah salah satu daerah yang mengalami proses Islamisasi sangat dalam. Akan tetapi Sulit dipastikan kapan sebenarnya Islam masuk ke daerah ini. Ada yang mengatakan abad ke-8, abad ke-12 dan bahkan ada juga yang memperkirakan abad ke-7 karena menurut almanak tiongkok, sudah didapati suatu kelompok masyarakat Arab di Sumatera Barat pada

tahun 674 M.⁹ Terlepas dari berbagai versi yang ada, Hamka mengatakan bahwa raja Islam pertama di Minangkabau (pagaruyung) adalah Raja Alam Arif sekitar tahun 1600 M. Oleh karena pusat kerajaan ini jauh dari daratan, diperkirakan bahwa dengan masuknya raja tersebut, berarti Islam telah menyebar di wilayah Minangkabau sekitar tahun 1600 M tersebut.¹⁰

Sejak Islam masuk ke Minangkabau, telah terjadi beberapa kali pembaharuan. Pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau yang dipelopori oleh kaum muda. Gerakan itu bertujuan untuk mengubah tradisi, terutama gerakan tarekat. Kaum muda melakukan perubahan melalui pendidikan, dakwah, media cetak dan perdebatan. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Sumatera Thawalib yang lebih mengutamakan ilmu-ilmu untuk menggali dan memahami Islam dari sumbernya.

Menyadari gencarnya kegiatan kaum muda, kaum tua pun mulai bergerak, mereka melakukan reaksi yang sama, yaitu dengan menerbitkan majalah. Diantara majalah yang mereka terbitkan termasuk *Suluh Melaju di Padang* (1913), *al-Mizan di Maninjau* (1918) yang diterbitkan oleh organisasi local *Sjarikat al-Ihsan*, *Al-Mizan*, (lain pula) 1928 dan *Suarti* (*Suara Perti*) dalam tahun 1940 yang

⁹ Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat, Lintas Historis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987), h. 111-112, dan lihat juga Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah. 1960), hlm. 17-18.

¹⁰ Hamka, *Ayahku Riwayat Hidup Dr. H. Abd Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama*, (Jakarta: Widjaya. 1950), hlm. 5.

berkenaan dengan soal-soal organisasi.¹¹ Dalam bidang pendidikan, kaum tua mengaktifkan lembaga surau. Kaum tua juga membentuk suatu perkumpulan yang bernama Ittihadul sebagai tandingan kaum muda yang dikenal dengan PGAI.

Diilhami oleh perkembangan tersebut, timbullah niat Syekh Sulaiman Ar-Rasuly untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua dalam sebuah wadah. Untuk itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuly, memprakarsai suatu pertemuan besar di Candung Bukittinggi pada tanggal 5 Mei 1928.¹² Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah kaum tua, diantaranya Syekh Abbas al-Qadhi, Syekh Muhammad Djamil Djaho, Syekh Wahid ash-Shahily dan ulama kaum tua lainnya. Dalam pertemuan itu disepakati untuk mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan MTI.

Pada tahun 1930, mengingat pertumbuhan dan perkembangan madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah, timbullah keinginan Syekh Sulaiman Ar-Rasuly untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua, terutama para pengelola madrasah dalam suatu wadah organisasi. Untuk itu, ia mengumpulkan kembali ulama-ulama kaum tua di Candung Bukittinggi pada tanggal 20 Mei 1930.¹³ Pertemuan ini memutuskan untuk membentuk organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan PTI. Ketika terbentuknya organisasi

¹¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES. 1980), hlm. 241.

¹² Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, (Jakarta PT. Ikhtiar Baru Van Hoove, 1994), hlm. 97.

¹³ Nelmawarni, dkk, "Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)", dalam *Sosiohumanika 16B (1)*, (Padang: IAIN-IB Press. 2003), hlm. 52.

ini ada 7 Madrasah Tarbiyah Islamiyah kepunyaan kaum Tua yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 1930 PTI mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah sebagai badan hukum, yang oleh karena itu tahun 1930 disebut juga sebagai tahun pertama bagi PTI. Jumlah ulama yang menggabungkan diri dengan PTI cukup banyak.¹⁴

Pada tahun 1935 diadakan rapat lengkap di Candung Bukittinggi yang menunjuk H. Siradjudin Abbas sebagai ketua Pengurus Besar PTI. Pada masa kepengurusan ini, berhasil disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh konferensi tanggal 11-16 Februari 1938 di Bukittinggi, dan disepakati juga singkatan Persatuan Tarbiyah Islamiyah berubah menjadi PERTI. Ketika itu dirumuskan pula tujuan organisasi ini, yaitu:

1. Berusaha memajukan pendidikan agama dan yang bersangkutan dengan itu.
2. Menyiarkan dan mempertahankan agama Islam dari segala serangan.
3. Memperhatikan kepentingan ulama-ulama, guru-guru sekolah agama seluruhnya, terutama sekolah-sekolah Tarbiyah Islamiyah.
4. Memperkukuh silaturahmi sesama anggota.
5. Memperkukuh dan mempekuat 'adat nan kawi, syara' nan lazim' dalam setiap negeri.¹⁵

¹⁴ Karel A. Steenbrik, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta: LP3ES. 1974), hlm. 64.

¹⁵ Nelmawarni, dkk, "Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)", dalam *Sosiohumanika 16B (1)*, (Padang: IAIN-IB Press. 2003), hlm.53.

Dalam Anggaran Dasar PERTI, dijelaskan bahwa struktur organisasi terdiri atas Pengurus Besar yang dibantu oleh Dewan Penasihat, yaitu para ulama senior PERTI. Dari Pengurus Besar, ditunjuk beberapa Pengurus Besar Harian yang meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara, yang semuanya berkedudukan di lokasi yang sama. Untuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat Pengurus Besar, dibentuk Majelis Wakil Pengurus Besar yang sekurang-kurangnya terdiri atas lima puluh anggota, dengan pimpinan yang disebut Konsul Pengurus Besar. Majelis ini bertugas mengoordinasikan cabang-cabang, sedangkan setiap cabang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan anak-anak cabangnya.

Selain struktur tersebut, PERTI memiliki dua lembaga pendukung, yaitu PERTI Putri yang dapat dibentuk pada setiap cabang PERTI Putra, serta Persatuan Murid-murid Tarbiyah Islamiyah (PMTI) yang dapat didirikan di setiap Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Selain itu, PERTI menjalin kerja sama dengan Jami'atul Washliyah, sebuah organisasi tradisionalis Islam di Sumatera Utara, melalui Piagam Takatuf yang menetapkan komitmen bersama untuk menjaga dan melestarikan ajaran Islam sesuai paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab Syafi'i dari segala bentuk ancaman dan gangguan eksternal.

Berbagai upaya ini, baik melalui kerja sama dengan kaum adat maupun melalui keteguhan mereka dalam mempertahankan tradisi keagamaan yang telah mengakar, menjadikan PERTI

mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Minangkabau. Lembaga-lembaga pendidikannya berkembang secara signifikan, dan organisasi PERTI secara bertahap memperluas jangkauannya hingga ke wilayah-wilayah di luar tempat kelahirannya. Tahun 1945, seperti telah disebut di muka, ia telah punya cabang di Kalimantan dan Sulawesi, memiliki 350 lembaga pendidikan dengan berbagai jenjang pendidikan serta punya anggota hampir 400.000 orang.

Islamisasi di Minangkabau berlangsung secara bertahap, penuh dinamika, dan tidak lepas dari perdebatan mengenai kronologi kedatangannya. Versi yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga abad ke-12, menunjukkan bahwa Islam masuk melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya, namun baru memperoleh legitimasi penuh setelah Raja Alam Arif dari Pagaruyung memeluk Islam pada awal abad ke-17. Hal ini menegaskan bahwa penerimaan Islam di Minangkabau tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, melainkan juga memiliki dimensi politik dan kultural, sebab Islam menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan kerajaan.

Memasuki abad ke-20, Minangkabau menjadi salah satu pusat penting gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Kaum Muda tampil dengan orientasi reformis, mengedepankan ijtihad, rasionalitas, dan pendidikan modern. Kehadiran lembaga seperti *Sumatera Thawalib* menjadi bukti bahwa mereka berusaha memutus ketergantungan pada tradisi tarekat yang dianggap tidak sesuai

dengan semangat purifikasi Islam. Media cetak, dakwah, dan perdebatan intelektual menjadi sarana utama dalam mengartikulasikan gagasan-gagasan pembaharuan.

Sebagai reaksi terhadap penetrasi gagasan modernis, Kaum Tua mengambil langkah strategis dengan mempertahankan pola pendidikan surau, menerbitkan majalah, dan membentuk perkumpulan seperti *Ittihadul Ulama*. Tindakan ini menunjukkan adanya dialektika ideologis yang sehat, di mana Kaum Tua tidak sekadar defensif, tetapi juga melakukan inovasi kultural untuk memperkuat basis tradisionalisme. Dengan demikian, lahirnya *Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)* merupakan konsekuensi logis dari dinamika pertarungan ideologi antara Kaum Tua dan Kaum Muda.

Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai figur sentral Kaum Tua tampil bukan hanya sebagai ulama karismatik, melainkan juga organisatoris ulung. Prakarsa beliau mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (1928), lalu membentuk Persatuan Tarbiyah Islamiyah (1930), memperlihatkan orientasi Kaum Tua yang bergerak dari basis pendidikan menuju organisasi modern. Pengakuan resmi pemerintah tahun 1930 sekaligus menandai bahwa PERTI telah memasuki arena sosial-politik yang lebih luas.

Struktur organisasi PERTI yang sistematis-dengan adanya pengurus besar, cabang, anak cabang, serta organisasi sayap seperti PERTI Putri dan PMTI-menunjukkan bahwa Kaum Tua

tidak kalah modern dibandingkan Kaum Muda dalam aspek kelembagaan. Tujuan organisasi yang dirumuskan, seperti Mendorong kemajuan pendidikan agama, memelihara dan mempertahankan ajaran Islam, serta memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan para ulama serta tenaga pendidik, serta memperkuat ikatan adat dengan syarak, menggambarkan bahwa PERTI berperan ganda sebagai penjaga tradisi sekaligus penggerak pendidikan Islam modern.

Perkembangan PERTI yang pesat hingga memiliki 350 lembaga pendidikan dan 400.000 anggota pada tahun 1945 menunjukkan adanya legitimasi sosial yang kuat. Faktor penting dari keberhasilan ini adalah kemampuan PERTI menjaga keseimbangan antara adat dan syarak, serta membangun jaringan kerja sama dengan organisasi tradisional lain seperti Jami'atul Washliyah. Sinergi ini membuat PERTI tampil sebagai kekuatan Islam tradisional yang kokoh, tidak hanya di Minangkabau, tetapi juga di berbagai wilayah Nusantara.

C. Paham Keagamaan Perti

1. Bermazhab Syafi'i

Di Minangkabau penghujung abad ke-19 atau di awal-awal abad ke-20, mazhab ini seakan-akan telah menyatu dengan kehidupan masyarakatnya. Bahkan, mungkin sekali, secara umum, masyarakat Minang menganggap bahwa itulah Islam yang sebenarnya. Itulah Islam yang perlu diamalkan dan juga perlu dipertahankan secara ketat. Maka, itulah sebabnya, ketika

beberapa ulama muda pembaharu pulang dari Makkah/Mesir dan melontarkan kritik-kritik tajamnya seperti disebut di atas, para ulama tua (Kaum Tua) yang ingin mempertahankan mazhab itu bangkit dan bersatu padu menentang arus modernisasi tersebut. dengan cara antara lain mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini. Jadi, agar rasa tanggung jawab untuk mempertahankan mazhab Syafi'i tumbuh subur di kalangan mereka, Perti sengaja mengangkat mazhab ini sebagai mazhab resmi organisasinya.

Ada, memang, alasan lain yang membuat para pendiri Perti ingin mempertahankan mazhab Syafi'i dan menjadikannya sebagai mazhab resmi Perti. Alasan-alasan itu adalah: pertama, mazhab ini dianggap sebagai "jalan tengah" antara aliran rasionalnya Abu Hanifah dan aliran tradisionalnya Malik. Kedua, menjaga agar trauma masa lalu yang ditimbulkan oleh gerakan pembaruan Paderi tidak terjadi lagi, dan dengan sendirinya, ketenangan beribadah menjadi terjamin. Ketiga, karena mazhab inilah yang mula-mula masuk dan mazhab ini juga yang membuat rakyat Indonesia memeluk Islam. Dengan demikian umat Islam Indonesia berutang budi kepadanya, dan untuk itu perlu dijaga kelangsungan hidupnya

K.H. Mansur Datuk Nagari Basa pun mengakui bahwa watak dinamis semacam itu tetap ada di tubuh Perti yang lahir dan berasal dari masyarakat Minang. Mereka senantiasa terbuka untuk pembaruan selama pembaruan itu positif dan apa pun bidangnya Hanya, Mansur menegaskan bahwa pembaruan

tersebut khusus untuk bidang mu'amalah, bukan bidang ibadah dan akidah. Dua bidang yang disebut terakhir ini tidak boleh diubah. Ia perlu dipertahankan sebagaimana adanya dan sebagaimana ia telah dianut serta diamalkan oleh masyarakat secara mapan. Banyak, menyang ibadah amaliah mazhab Syafi'i yang dianut dan dipertahankan secara ketat oleh orang-orang Perti. Tetapi sepuluh bentuk amalan di bawah ini dianggap substansial. Karena dengan sepuluh ibadah inilah, antara lain, orang-orang Perti memberi ciri kelompok mereka, dan hal-hal ini pulalah yang muncul sebagai problema kontroversial antara "Kaum Tua" dan "Kaum Muda" pada masa itu. Kesepuluh bentuk amalan tersebut adalah:

- a. Wajib membaca bismillah ketika membaca fatihah dalam shalat.
- b. Disunnahkan membaca qunut pada rakaat kedua shalat subuh.
- c. Wajib mengqadha shalat yang tidak dikerjakan di waktunya.
- d. Boleh membaca ushali sebelum takbirat al-ihram ketika hendak mengerjakan shalat.
- e. Bilangan rakaat shalat tarawih adalah 20 rakaat.
- f. Shalat 'led (Hari Raya) lebih afdhal di masjid, bila masjid masih mampu menampung jamaah yang hendak mengerjakan shalat tersebut. Namun bila sudah melebihi dayaampungnya, maka shalat 'led itu lebih afdhal dilaksanakan di lapangan.

- g. Sunnah membaca azan pertama di hari Jumat.
- h. Afdhal membaca sayyidana ketika menyebut nama Nabi Muhammad Saw, dalam bershalawat kepadanya.
- i. Sah doa dengan tawassul.
- j. Boleh menghadihkan pahala doa, pahala sedekah dan pahala waqaf kepada orang-orang yang sudah mati.

dari beberapa bentuk paham dan amalan orang-orang Perti di bidang ibadah dari sekian banyak lagi amalan yang mereka pertahankan dalam tradisi keagamaannya. Umumnya, mereka beranggapan bahwa sepuluh hal di atas adalah amalan-amalan yang perlu diyakini kebenarannya. Hanya, perlu dicatat, sekalipun sepuluh hal itu dianggap penting, masalah bacaan bismillah dalam Al-Fatihah; qunut shalat subuh; dan shalat Tarawih 20 rakaat, adalah ibadah yang sangat ditekankan untuk diamalkan oleh anggota Perti. Artinya, seseorang baru dianggap sah sebagai orang Perti, bila mereka meyakini dan mengamalkan amalan yang tiga itu. Bila tidak, kepertian mereka perlu dipertanyakan kembali.

2. Bermazhab Sunni

Perti juga menyatakan dirinya sebagai penganut setia mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah di bidang akidah. Dan, sebagaimana halnya terhadap mazhab Syafi'i, organisasi ini pun menyatakan diri sebagai benteng pertahanan mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya dari paham-paham lain yang tidak sesuai dengannya.

Kaum Ahl al-Sunnah menurut Sirajuddinn, adalah kaum yang menganut iktikad sebagaimana yang dianut oleh Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya. Iktikad itu telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi secara terpecah, belum dirumuskan secara teratur. Iktikad tersebut kemudian, dikumpul dan dirumuskan oleh dua orang ulama besar Ushuluddin: Abu Hasan al-'Asyari (260-324 H), dan Abu Mansur Al-Maturidi (wafat tahun 333 H). Karena disusun oleh dua orang ini, maka ajarannya sering pula disebut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tetapi dalam perkembangan dan penulisan sejarah berikutnya sering disebut Sunni saja, sebagai singkatan dari Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.¹⁶

Apa yang dikemukakan oleh Sirajuddinn Abbas di atas ternyata sama dengan apa yang dipahamkan oleh para ahli ilmu keislaman lainnya. Al-Zabidi, misalnya, dalam bukunya *Sadat al-Muttaqin*, seperti dikutip oleh Sirajuddinn, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kaum Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah adalah orang-orang yang mengikuti paham (rumusan) al-'Asyari dan al-Maturidi. Prof. Harun Nasution juga berkesimpulan demikian. Tokoh yang disebut terakhir ini berkata bahwa yang dimaksud dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, Sunni dalam lapangan teologi Islam adalah kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah.¹⁷

¹⁶ Sirajuddinn Abbas, *Iktikad Ahlussunnah wa al-jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991), hlm. 16-17

¹⁷ Baca, Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI-Press, 1978), hlm. 65.

Perlu dicatat bahwa meskipun istilah “kaum Sunni” secara umum merujuk pada pengikut al-Asy’ariyah maupun al-Maturidiyah, orientasi teologis kelompok PERTI tampak lebih menekankan pada tradisi Asy’ariyah. Dalam hampir setiap diskusi yang berkaitan dengan teologi, anggota PERTI cenderung merujuk pada ajaran Asy’ari atau al-Asy’ariyah. Bahkan, dalam karya Sirajuddin yang berjudul *Itiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah*, hanya ajaran Asy’ari yang diuraikan ketika membahas perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Alasan di balik fokus eksklusif ini belum dapat dipastikan secara jelas, sehingga terdapat kesan bahwa identitas ke-Sunni-an PERTI lebih condong pada al-Asy’ari, meskipun mereka tetap mengakui al-Maturidiyah sebagai bagian dari Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Tetapi bila kita ikuti kedua ajaran ini (al-Asy’ariyah dan al-Maturidiyah) lebih jauh, ternyata antara keduanya untuk beberapa hal tidaklah selalu sama. Memang, kehadiran al-Maturidiyah mempunyai motif yang sama dengan al-Asy’ariyah, yaitu menentang ajaran-ajaran Mu’taziliah.¹⁸

¹⁸ Alaidin Koto, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sejarah, Paham Keagamaan, dan Pemikiran Politik 194-1970*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 80.